

# PEMBANGUNAN DAN TRANSFORMASI BUDAYA DALAM OTONOMI DAERAH

Miswardi\*

*Abstract: We believe that development with leaving the local values, will make it -development- will not survive during the time (won't be sustainable). Therefore, a development must can respons local culture and values so that that development can be responsip and can be continuable. It can be done if the society felts that a development is a collective responsibility. Now, Indonesia has very high probability to realize it, as autonomy is given to region -district- by central government.*

*Keywords: Development, Culture Transformation*

## PENDAHULUAN

Pembangunan selalu menyangkut perubahan persepsi dan sikap terhadap kehidupan secara menyeluruh. Oleh karena itu setiap proses pembangunan selalu menyangkut pelbagai sektor seperti sektor objek pembangunan. Misalnya sebagaimana pandangan Soedjatmoko<sup>1</sup> tentang pembangunan ekonomi bahwa pembangunan ekonomi itu bukan saja hanya proses ekonomi semata-mata, melainkan juga merupakan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa dalam kebulatannya. Lebih jauh Soedjatmoko<sup>2</sup> mengatakan tentang pembangunan ekonomi dengan proses perubahan secara luas dapat dilihat pada tanggapannya terhadap proses industrialisasi. "Pemasukan mesin-mesin hanya merupakan permulaan proses perubahan sosial dan tanggapan jiwa bangsa. Cara-cara organisasi kerja, seperti disiplin kerja, kecakapan bekerja, dan sebagainya selain kecakapan untuk menggunakan mesin itu merupakan sebahagian dalam kehidupan masyarakat modern. Malahan lebih jauh lagi, masyarakat akan mempunyai keinginan dan kesanggupan, untuk memelihara mesin itu dan menciptakan mesin-mesin yang lebih

---

\* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

baik supaya lebih sesuai lagi dengan keperluan sendiri. Nyatalah bahwa mesin itu hanyalah pernyataan dan alat suatu masyarakat untuk mencapai tujuannya. Masyarakat tidak dapat melepaskan mesin itu serta teknologi umumnya dari nilai-nilai masyarakat kerana ia dianggap penting oleh masyarakat itu. Dengan perkataan lain mesin serta teknologi merupakan penjelmaan kebudayaan suatu masyarakat yang tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan yang menciptakannya”.

Meskipun proses pembangunan suatu masyarakat itu ke arah yang sesuai dengan cita-cita pembangunan, transformasi suatu masyarakat berkaitan langsung dengan ciri sosial budaya masyarakat tersebut. Terdapat tiga pokok pikiran dari kutipan pandangan Soedjatmoko di atas. *Pertama*, proses pembangunan suatu masyarakat memerlukan suatu proses transformasi budaya<sup>3</sup> untuk membentuk kesiapan masyarakat dalam menerima benda (teknologi, misalnya) dan nilai-nilai baru yang melekat di dalamnya. Proses transformasi budaya disini merupakan titik awal dari penyesuaian dalam proses peningkatan kemampuan pencapaian tujuan masyarakat secara umum. *Kedua*, proses transformasi dalam masyarakat, sesungguhnya merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan membangun basis kekuatan yang mendukung proses pembangunan. *Ketiga*, jika teknologi dianggap sebagai alat untuk mencapai kepentingan manusia, teknologi itu harus meningkatkan kehidupan manusia.

Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa posisi kebudayaan sebagai model bagi tindakan-tindakan manusia. Sebagai model, kebudayaan sebagai sesuatu yang tidak hanya dapat menjelaskan realitas kehidupan, tetapi juga seperti ditegaskan oleh Alfian<sup>4</sup> kebudayaan menjadi unsur utama dalam proses pembangunan diri manusia dan masyarakat. Seperti halnya Soedjatmoko, Alfian menekankan fungsi kebudayaan sebagai acuan nilai dalam menjaring unsur-unsur baru yang relevan bagi pembangunan manusia di dalam proses transformasi budaya. Apalagi jika disepakati bahwa pembangunan, sesungguhnya adalah pembangunan manusia yang seharusnya dilakukan oleh manusia.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, dapat dilihat tiga proses kebudayaan mengambil tempat yang sangat penting di dalamnya. *Pertama*, kebudayaan merupakan aspek penting di dalam mendorong proses transformasi. *Kedua*, Kebudayaan sekaligus dinilai sebagai penghambat proses transformasi kerana nilai-nilai yang dimilikinya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai praktek kehidupan baru. *Ketiga*, kebudayaan harus pula dilihat sebagai produk dari suatu proses transformasi kerana ia diproduksi di dalam kehidupan sehari-hari.

## BUDAYA DAN PEMBANGUNAN

Budaya merupakan suatu modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan suatu bangsa, karena budaya selalu memiliki nilai-nilai luhur yang tidak pernah luntur sesuai dengan cita-cita sosial. Kebudayaan tradisional dianggap sebagai kendala pembangunan, ini bermakna bahwa kendala-kendala semacam itu harus dihapuskan, kebudayaan dapat dianggap sebagai modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, misalnya ide gotong royong dapat dikembangkan untuk kepentingan mobilisasi tenaga kerja di dalam pembangunan sesuatu dan dalam menggalang modal membiayai pembangunan. Jhon Bowen<sup>6</sup> telah memperlihatkan pemanfaatan sistem gotong royong pada masa Soekarno. Dalam hal ini kebudayaan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga ia betul-betul menjadi idiologi umum untuk mensukseskan proses pembangunan.

Mengikuti tradisi berfikir Weber, kebudayaan lokal masyarakat dapat menjadi kekuatan penting yang mengubah tata ekonomi masyarakat ke arah kemajuan, seperti terbukti dari peranan kebudayaan dikalangan calvinis. Kepercayaan terhadap “orang terpilih” dalam *cosmopologi calvinis* telah membangkitkan semangat kerja yang terus menerus untuk memastikan apakah seorang terpilih atau tidak. Kepastian tentang keselamatannya hanya dapat dilihat di dalam keberhasilan di dunia.<sup>7</sup> Keyakinan semacam itu ditunjukkan oleh Weber sebagai kekuatan yang besar di dalam menghasilkan organisasi kerja dan dalam mengatur perilaku ekonomi.

Masih dalam tradisi yang sama, Robert Bellah<sup>8</sup> telah menunjukkan bahwa agama Tokugawa merupakan sumber inspirasi penting di dalam tindakan ekonomi masyarakat Jepang, yang kemudian melahirkan revolusi ekonomi.

Dalam masyarakat Indonesia umumnya dan pada masyarakat Melayu khususnya, agama telah pula menjadi pendorong penting dalam tahap awal proses modernisasi dipelbagai tempat, terutama pada saat perdagangan menjadi bahagian dari penyebaran agama di daerah-daerah pesisir pulau Jawa<sup>9</sup> meskipun kekuatan agama ini melemah setelah Belanda masuk ke Indonesia pada awal abad ke 17, agama tetap memiliki arti penting, terutama dalam mengendalikan pelbagai tindakan bebas terhadap pemerintah kolonial Belanda.<sup>10</sup>

Peranan etika agama dalam proses transformasi sosial sangat penting misalnya dalam transformasi ekonomi di banyak negara di dunia.<sup>11</sup> Peranan agama dalam kehidupan sosial dapat dipandang sebagai dasar pembentukan rasionalisasi kehidupan yang memberi basis kepada perkembangan ekonomi.<sup>12</sup>

Agama berfungsi sebagai perangsang di dalam proses transformasi konseptual (pandangan hidup) yang secara langsung berkaitan dengan apa yang dimaksudkan Weber sebagai rasionalisasi, yakni organisasi kehidupan sosial ekonomi atas dasar prinsip-prinsip efisiensi.

Seiring dengan tumbuhnya rasionalisme berarti pada masa yang sama pupusnya praktek-praktek magis dan spekulatif dalam masyarakat.<sup>13</sup> Hasil reformasi yang dilakukan oleh lembaga agama, menurut Weber, muncul suatu pola kehidupan ekonomi yang konsisten, sistematis dan etis.<sup>14</sup> Agama telah membantu proses sejarah peradapan dengan cara mendorong perubahan dalam orientasi nilai, yaitu dari suatu masyarakat yang masih terikat pada nilai-nilai magis ke masyarakat yang lebih berorientasi pada nilai-nilai rasional. Agama menjadi kekuatan yang menghapuskan ikatan-ikatan tradisional yang menekankan kehidupan sebagai bagian dari tatanan yang harmoni.<sup>15</sup>

Interaksi kebudayaan dengan sistem kapitalisme dapat dilihat pada penyesuaian–penyesuaian yang dilakukan melalui kebudayaan untuk menjadi faktor penting di dalam perubahan. Untuk itulah Geertz<sup>16</sup> dengan tegas mengatakan bahwa:

*“... industrialism may not necessarily in volve free- enterprise capitalism, it does involve the decline of magic, the construction of a legal and moral code, increased social mobility, and the isolation of the elementary family from strong extended kinship ties.”*

Disini terlihat bahwa modernisasi ekonomi memerlukan transformasi budaya yang memberikan jalan bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Gotong royong, misalnya telah menjadi faktor penting di dalam transformasi masyarakat karena institusi ini memberikan makna tentang akumulasi modal dan tenaga yang kemudian menjadi kekuatan gabungan di dalam setiap perubahan yang dilakukan bersama. Gotong royong yang dilakukan di pelbagai tempat telah dilakukan dengan berlainan pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, karena transformasi gotong royong pada masa Orde Baru telah menjadi institusi pemerintah di dalam mensukseskan tujuan-tujuan pembangunan.<sup>17</sup>

Fungsi budaya lokal dalam perubahan masyarakat harus ditegaskan kembali karena nilai tersebut telah dikesampingkan dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup> Kebudayaan masyarakat seharusnya berfungsi dalam memberikan nilai setiap perubahan sehingga perubahan itu tidak berada di luar jalur nilai-nilai yang disepakati. Persoalan yang dihadapi dalam kenyataan sekarang adalah perubahan itu sendiri yang didasari oleh kepentingan ekonomi.<sup>19</sup> Perubahan itu

telah berlangsung sedemikian cepat sehingga tidak saja menyebabkan arah perubahan menjadi tidak jelas, tetapi juga menyulitkan adaptasi manusia di dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. George Simmel menggambarkan kecenderungan ini dengan jelas:

*“... that objective culture development a degree and tempo which leaves farther and farther behind the cultivation of subjects, which alone provides meaning for all perfections of objects; that the individual branches of culture grow apart in divergent direction and mutual alienation, such as that fate of the power of babel and its deepest value, which exists precisely in the coherence of its parts, seems threat ened with its annihilation.”<sup>20</sup>*

Pandangan Simmel tersebut dapat ditanggapi sebagai suatu peringatan terhadap tragedi modernitas, kerana formalisasi kehidupan dan keterasingan manusia merupakan ujung dari evolusi peradaban.

Melihat kenyataan bahwa proses konsumsi telah mempengaruhi pembentukan tata nilai yang menjadi alat ukur dominan dalam pembentukan status dan identitas, kebudayaan lokal sesungguhnya sedang kehilangan pengaruhnya. Di dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat konsumerisme sekarang ini, fungsi kebudayaan lokal sebagai referensi tradisional mulai melemah. Satu usaha yang perlu dilakukan adalah memperkuat kedudukan kebudayaan dan mengintensifkan fungsi kebudayaan dalam pelbagai bidang kehidupan sehingga kebudayaan asli tidak hanya dipahami oleh generasi tua saja.

Dalam hal ini, peranan kebudayaan secara luas lebih bersifat internal yaitu pengembangan ciri-ciri lokal yang mendukung proses perubahan secara luas. Sifat kebudayaan adalah melicinkan jalan bagi proses pembangunan sehingga ia lebih bersifat melayani perubahan. Kebudayaan dalam konteks ini tidak hanya memiliki posisi sebagai faktor penilaian yang menilai perubahan dari paradigma kebudayaan. Ia dikatakan sebagai paradigma kebudayaan di dalam melihat proses perubahan yang terletak pada nilai-nilai kolektif yang menjadi asas dari pembentukan institusi-institusi sosial. Seharusnya institusi sosial ini akan dikukuhkan melalui proses transformasi karena pada dasarnya masyarakat selalu mengalami perubahan dari masa ke masa.

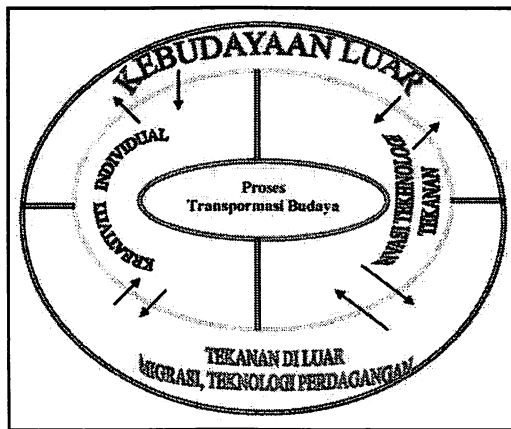
Persoalan yang muncul ialah bagaimana sifat-sifat suatu kebudayaan yang dapat mendukung dan mendorong proses perubahan? Bagaimanapun usaha perubahan suatu masyarakat sehingga dapat menyangkut penerimaan unsur-unsur baru? Dalam hal ini tidak dapat dihindari untuk mengasumsikan bahwa masyarakat itu sendiri mengalami dinamika secara internal, karena dia

melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam interaksinya dengan ide-ide dan praktek kehidupan baru.

## PROSES TRANSFORMASI BUDAYA DALAM SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa suatu proses transformasi terjadi disebabkan oleh empat faktor.<sup>21</sup> *Pertama*, karena masuknya kebudayaan luar yang merubah tata nilai, antara lain disebabkan oleh proses komunikasi global. *Kedua*, kreativitas internal yang membentuk inovasi intelektual dan ditandai dengan penemuan-penemuan baru dalam kehidupan. *Ketiga*, tekanan dari luar yang terlihat dalam proses migrasi, teknologi baru dan perdagangan. *Keempat*, Perubahan dari dalam, berupa inovasi teknologi yang selain memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia juga berfungsi dalam melaksanakan suatu praktek kehidupan baru yang sesuai dengan teknologi yang dihasilkan.

Gambar Proses Transformasi dalam Sistem Manajemen Pemerintahan



Secara terang dapat dilihat ialah faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang berbeda antara satu sama lain dalam mempengaruhi perubahan suatu masyarakat. Kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan, bahkan saling mempengaruhi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal untuk menentukan bentuk perubahan suatu masyarakat. Dalam bentuk seperti ini dapat terlihat bagaimana kekuatan internal masih mampu menjadi penyaring dalam setiap proses transformasi sehingga transformasi budaya tidak melahirkan

suatu budaya menyimpang. Dalam hal ini yang terpenting adalah melakukan kajian dan pembaharuan kebudayaan sehingga kebudayaan lokal dapat memberikan nilai setiap proses perubahan untuk mengarahkan transformasi budaya ke arah yang lebih menguntungkan kepada manusia. Untuk itu dukungan yang penuh dari pihak pemerintah merupakan prasyarat penting di dalam kajian dan pembaharuan kebudayaan, khususnya dalam melakukan kajian dan pengembangan budaya lokal.

Transformasi budaya dalam usaha membangun dasar yang kukuh bagi usaha pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa pembangunan berikutnya, diperlukan suatu proses transformasi kebudayaan sehingga kebudayaan dapat menjadi pendukung. Dalam hal ini kebudayaan harus berfungsi sebagai infrastruktur yang berfungsi membuka jalan bagi proses modernisasi dan perubahan sosial secara umum. Untuk itu perlu dilakukan transformasi budaya agar menjadi filsafat sosial yang mempengaruhi semangat kerja dan sikap-sikap hidup yang berorientasi pada kemajuan. Aspek yang paling lemah selama ini ialah pada aspek manajemen pemerintahan, karena sistem manajemen pemerintahan awam sangat jauh meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, dengan lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai luar yang sangat jauh dari nilai-nilai budaya masyarakat lokal, sehingga tidak dapat disalahkan bahwa masyarakat lokal tidak memberikan respons secara sempurna apa-apa yang diputuskan oleh pihak pemerintah.

Kebudayaan yang mengakar dari dalam masyarakat, harus menjadi sumber inspirasi bagi setiap individu dalam praktek kehidupannya sehingga dapat menjadi referensi utama dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupannya, seperti dikatakan oleh Parsudi Suparlan<sup>22</sup> bahwa "Kebudayaan ialah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya ialah peringkat-peringkat, model-model pengetahuan yang secara selektif yang dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi bagi mendorong serta menumbuhkan tindakan yang diperlukan." Lebih lanjut Nur Syam mengatakan<sup>23</sup> "Kebudayaan dalam konsep ini mengandung dua unsur utama, yaitu sebagai pola BAGI tindakan dan sebagai pola DARI tindakan." Sebagai pola bagi tindakan kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong dan menciptakan tindakan atau dalam makna lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh

manusia sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata adanya atau dalam makna lain ialah wujud suatu tindakan.

Manajemen pemerintahan, harus berupaya menggali nilai-nilai masyarakat lokal sehingga masyarakat dapat menerima setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai satu keputusan yang sesuai dengan apa-apa saja yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu kebudayaan harus dibina dan dikembangkan yang kemudian disebarakan dalam masyarakat. Pemikiran kebudayaan melalui pelbagai saluran perlu digalakkan dan usaha mengaktifkan kembali lembaga kebudayaan merupakan syarat yang perlu karena dari sanalah ide-ide kebudayaan dilahirkan dan menempatkan budaya-budaya lokal sebagai suatu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## KESIMPULAN

Otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk melakukan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap aspirasi masyarakat, karena dewasa ini telah disadari bahwa tidak ada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) apabila pembangunan itu tidak tidak merespons nilai-nilai budaya masyarakat lokal dimana pembangunan itu ada, semakin jauh pembangunan dari nilai-nilai budaya masyarakat lokal, maka respons masyarakat juga akan semakin berkurang.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya lokal masyarakat daerah. Sehubungan dengan itu sesuai dengan pemerintahan Indonesia yang menganut asas demokrasi, maka pembangunan juga harus dilakukan secara demokratis baik dari aspek proses maupun dari aspek hasil. Untuk menghasilkan pembangunan yang demokratis langkah utama yang harus dilakukan adalah mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal dalam pembangunan. Untuk itu selaras dengan visi otonomi yang memberikan peluang kepada daerah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya lokal, maka tugas pembangunan yang utama adalah mentransformasikan nilai-nilai budaya lokal dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sistem pemerintahan. Karena diyakini setiap budaya lokal masyarakat memiliki kearifan (*wisdom*). [ ]



## ENDNOTES

<sup>1</sup> Tulisan Soedjatmoko, dalam *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1983), halaman 21.

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 6.

<sup>3</sup> Transformasi suatu masyarakat harus mengandung tiga agenda. Pertama, transformasi bersifat analitis. Sifat ini mengacu kepada kualitas abstrak tentang struktur sosial dan proses perubahannya. Secara analitis, proses ini bersifat universal, baik dari segi ruang maupun waktu. Dalam hal ini transformasi mengandung pengertian terjadinya peningkatan kompleksitas sosial suatu masyarakat. Kedua, sifat historis. Proses ini menunjukkan periode waktu tertentu yang dalam satuan waktu tersebut dapat dilihat ciri-ciri baru dalam suatu masyarakat. Ketiga, sifat praktis dari transformasi yang serangkaian keputusan dirumuskan untuk pembangunan kompleksitas masyarakat. Dalam ketiga orientasi ini kebudayaan boleh ditempatkan pada posisi yang berbeda. Dalam orientasi ketiga, misalnya, kebudayaan lebih merupakan infrastruktur yang memungkinkan transformasi terjadi dan sekaligus sebagai objek yang dikenai proses transformasi. Sebagai infra struktur, kebudayaan bersifat melayani.

<sup>4</sup> Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1982). halaman 18.

<sup>5</sup> David C Kortten, "Pembangunan yang Berpusat Pada rakyat: Menuju Suatu Kerangka Kerja", dalam David C Kortten dan Sjahrir (ed), *Pembangunan Berdeminsi Kerakyatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988) halaman 376.

<sup>6</sup> Jhon Bowen, (1986), *On The Political Konstruktion of Tradition: Gotong Royong in Indonesia*" *Jas* 45, halaman 545-556.

<sup>7</sup> Max Weber, "*The Protestant Ethic and the Spirit Of Capitalism*" dalam Irwan Abdullah, *Tantangan pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya*, *Jurnal Humaniora*, Volume XIV, No.3/2002. 262.

<sup>8</sup> R.N.Bellah, (1992), *Religi Tokugawa: Akar-Akar Budaya Jepang*, (Jakarta: Gramedia, 1992) halaman 25

<sup>9</sup> Greoneveldt, W.P., *Historical Notes On Indonesia and Malaya: Compled from Chinese Sources*, (Jakarta: Bharata, 1960) halaman 122. Juga dapat dilihat dalam Meilink-Roelofsz, M.A.P. *Trade and Islam In the Malay- Indonesian Archeipelago. The Hague*, (Martinus Nijhoff, 1966). Dan Drewes, G.W.J. (1967), *New Light on En The Coming Of Islam to Indonesia*, BKI 12 (4); 433-59. Dan Van Leur, J.C. (1983), *Indonesia Trade and Society: Essays In Asian Sosial and Economic History. Dordrecht, The Netherlands: Foris Publication*, halaman 112.

<sup>10</sup> Breman, Jan C, (1982), *Control of Land Labour In Colonial Java*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde.halaman 76 dan Kuntowijoyo,(1987), *Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta*, Tiara wacana, halaman 85.

<sup>11</sup> Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: SosialChange and Economic Modernization in Two Indonesia Towns*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1963), dan dalam Lance Castles, *Religion, Politics, Economic Behaviour in Java: The Kudus Cigarette Industry*. Cultural Report Series No. 15 Yale University. Dan Yahya Muhaimin, *Muslim Traders: The Stillbom Bourgeoisie*, (Prisma 49, 1990): halaman 83-90.

- <sup>12</sup> Irwan Abdullah, (1999), *The Muslim Businessmen of Jatimom: Religius Reform and Economic Modernization in a Javanese Town*. Disertasi Ph.D, University of Amsterdam. Belanda.
- <sup>13</sup> Max Weber, (1977), *Economic and Society*. (Berkley: University Of California Press, 1977) edited by G.Roth and C.Wittich, halaman 121
- <sup>14</sup> Max Weber *ibid*, halaman 587.
- <sup>15</sup> Irwan Abdullah, *Loc-cit*, halaman, 173.
- <sup>16</sup> Clifford Geertz, *Peddlers and Princes, Sosial Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. (Chicago: The University of Chicago Press,1963) halaman 143.
- <sup>17</sup> Pernyataan ini dapat juga dilihat dari apa yang telah pernah ditulis oleh Jhon Bowen, (19-86), dalam *On The Political Konstruktin of Tradition: Gotong Royong in Indonesia*., Jas 45 (3): halaman 545-556
- <sup>18</sup> Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1982) halaman 61.
- <sup>19</sup> Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya suatu kebudayaan baru dalam masyarakat perkotaan iaitu budaya konsumsi yang tinggi atau konsumerisme.
- <sup>20</sup> Donald N. Levine, (1990), *Simmel as Edocator. On Individuality and Modern Culture Theory*, *Culture and Society* 8 (3) halaman 109.
- <sup>21</sup> Penjelasan rinci mengenai penyebab transformasi ini dapat dilihat dalam Anthony Smith, (1973), dalam kritiknya terhadap teori perubahan sosial.
- <sup>22</sup> Parsudi Suparlan, *Kebudayaan dan Agama*, Dalam Media IKA No.X, 1986 halaman 107.
- <sup>23</sup> Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007) halaman, 91.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1999, *The Muslim Businessmen of Jatimom: Religius Reform and Economic Modernization in a Javanese Town*. Disertasi Ph.D, University of Amsterdam. Belanda.
- Alfian, 1982, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Bowen, Jhon.1986. *On The Political Konstruktin of Tradition: Gotong Royong in Indonesia*” Jas 45
- Breman, Jan C, 1982, *Control of Land Labour In Colonial Java*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde
- Castles, Lance. 1967. *Religion, Politics, Economic Behaviour in Java: The Kudus Cigarette Industry*. Cultural Report Series No. 15 Yale University.
- Geertz, Clifford, 1963, *Peddlers and Princes: SosialChange and Economic Modernization in Two Indonesia Towns*. Chicago: The University of Chicago Press
- Greoneveldt, W.P.1960, *Historical Notes On Indonesia and Malaya: Compled from Chinese Sources*, Jakarta, Bharata, halaman 122.

- Korten, David C. 1988, *Pembangunan yang Berpusat Pada rakyat: Menuju Suatu Kerangka Kerja*, dalam David C Korten dan Sjahrir (ed.). *Pembangunan Berdeminsi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kuntowijoyo, 1987, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara wacana
- Levine, Donald N. 1990, *Simmel as Educator. On Individuality and Modern Culture Theory, Culture and Society* 8 3
- Martinus Nijhoff dan Drewes, G.W.J. 1967, *New Light on En The Coming Of Islam to Indonesia*, BKI 12 4; 433-59.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 1966. *Trade and Islam In the Malay- Indonesian Archipelago. The Hague*,
- Muhaimin, Yahya. 1990, *Muslim Traders: The Stillbom Bourgeoisie*. [t.t.]: [t.p.]
- R.N.Bellah, 1992, *Religi Tokugawa: Akar-Akar Budaya Jepang*. Jakarta: Gramedia
- Soedjatmoko, 1983. dalam *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Suparlan, Parsudi. 1986. *Kebudayaan dan Agama*, Dalam Media IKA No.X
- Syam, Nur. 2007, *Mazhab-Mazhab Antropologi*, Yogyakarta: LKiS
- Van Leur, J.C. 1983, *Indonesia Trade and Society: Essays In Asian Sosial and Economic History*. Dordrecht, The Netherlands: Foris Publication
- Weber, Max. 1977. *Economic and Society*. edited by G.Roth and C.Wittic. Berkley: University Of California Press
- \_\_\_\_\_. 1930, *The Protestant Ethic and the Spirit Of Capitalism*. New York and London: Scribner. dalam Irwan Abdullah, *Tantangan pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya*, Jurnal Humaniora, Volume XIV, No.3/2002. 262.